

KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

LOCAL GOVERNMENT CONTRIBUTION TOWARDT DISASTER RISK MANAGEMENT FOR DISABILITIES

Lidya Nugrahaningsih Ayal

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta Indonesia
Email: lidiaayal1@gmail.com, HP: 081210435825

Safa'at Ariful Hudha

LPPM Bina Insan Mandiri Yogyakarta, Indonesia
Email: safaat.a.huda@gmail.com, HP: 085649894591

Diterima: 7 Oktober 2020

Direvisi: 5 November 2020

Disetujui: 7 Desember 2020

Abstract

Indonesia is an archipelago with a high natural disaster vulnerability. There are more than 3.721 cases of natural disasters in Indonesia throughout 2019. This phenomenon raises many efforts to anticipate the impact reduction through disaster risk management, especially for the persons with disabilities. This study aimed to reveal government's contribution toward disaster risk management for disabilities. This study is a survey research with descriptive qualitative approach to obtain the depth information toward the social phenomenon. Banda Aceh is chosen in this research with the consideration that the place and society in this area had been victims of natural disaster. Result of this study is local governments contribution toward disaster risk management for the persons with disabilities is still limited to providing assistance during emergency response. Local government has not been able to reach many efforts related to the community empowerment yet, especially for the persons with disabilities. The solution to that case is maximalization of assistance and coordination strengthening with non-government organization by the government. The recommendation that proposed in this study are conducting cross-sectoral coordination, optimizing social volunteers, and improving the quality of public facilities for disabilities.

Keywords: *Government's Contribution; Disaster Risk Management; Persons with Disabilities*

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Sepanjang tahun 2019 terdapat 3.721 peristiwa bencana alam di Indonesia. Fenomena tersebut memunculkan upaya untuk melakukan antisipasi terhadap pengurangan dampak melalui pengelolaan risiko bencana terutama bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan solusi pemerintah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna memperoleh informasi secara mendalam tentang kontribusi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola resiko bencana bagi penyandang disabilitas. Kota Banda Aceh dipilih dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa tempat dan masyarakat pada daerah tersebut pernah menjadi korban bencana alam tsunami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas masih sebatas pemberian bantuan pada saat tanggap darurat. Pemerintah daerah hingga saat ini belum bisa maksimal dalam menjangkau upaya-upaya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas. Solusi pada kasus tersebut adalah dengan memaksimalkan bantuan dan penguatan koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat. Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi lintas sektor; optimalisasi relawan sosial kebencanaan; dan peningkatan mutu fasilitas umum ramah disabilitas

Kata kunci: Kontribusi Pemerintah; Pengelolaan risiko bencana; penyandang disabilitas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hampir tidak ada daerah di Indonesia yang terbebas dari ancaman bencana alam, karena terletak pada jalur gempa teraktif dunia. Indonesia juga berada di atas tumbukan lempeng besar dunia, Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur (Oos, 2014). Indonesia juga berada pada tiga sistem pegunungan yaitu pegunungan Alpine Sunda, Circum Pasifik, dan Circum Australia. Kondisi geografis beserta fenomena alam yang ada menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi sejumlah bencana alam. Bahkan letusan Gunung Krakatau pada Agustus 1883 merupakan salah satu bencana alam terdahsyat di dunia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai institusi nasional yang menangani kebencanaan merangkum sepanjang tahun 2019, terdapat 3.721 peristiwa bencana alam di Indonesia. Seluruh bencana tersebut memberikan dampak yang sangat serius, baik yang berkaitan dengan korban meninggal dunia, orang hilang, mengungsi, luka-luka, maupun dampak yang berkaitan dengan kerusakan alam, fasilitas hidup termasuk rumah dan fasilitas publik. Peristiwa bencana yang terjadi sangat berpotensi mengancam dan mengganggu kehidupan ataupun penghidupan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis masyarakat.

Bencana sering dipahami sebagai peristiwa alam ekstrim yang berada di luar kendali manusia, dan dapat menimbulkan jatuhnya korban serta kerusakan alam (Spurway, 2016). Potensi kerusakan dan kerugian tersebut perlu disiasati dengan upaya pengelolaan risiko bencana, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah bencana terjadi. Seiring dengan seringnya bencana alam, maka antisipasi pengurangan risiko bencana untuk penanganan bantuan harus dilakukan dan dirancang secara sistematis, terpadu, dan terencana dengan sangat baik (Paidi, 2012). Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi risiko bencana agar dapat diminimalkan, dan tidak merambah kepada kerusakan lain yang lebih luas.

Langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengelolaan risiko bencana dapat terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, direncanakan dan dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Hal ini biasanya berhasil, apabila orang atau masyarakat masih mengingat tipe dan dampak dari bencana yang pernah mereka alami. Kemudian saat bencana terjadi, dalam menyelamatkan diri diperlukan pertolongan darurat secepat mungkin. Tahap rehabilitasi, direncanakan secepat mungkin setelah fase pemulihan dimulai, dan seringkali dibagi pada tahap pemulihan dan rekonstruksi awal (Kamil, 2016). Pengelolaan risiko bencana terbagi dalam tiga fase pokok, yaitu: fase pra-bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Pengelolaan bencana yang direpresentasikan sebagai model siklus, peningkatan kesiapsiagaan merupakan bagian dari proses pengelolaan risiko bencana.

Untuk menjamin tercapainya suatu tingkat kesiapsiagaan, diperlukan berbagai langkah persiapan pra-bencana. Sedangkan keefektifan dari kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat dari implementasi kegiatan tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Pada saat pelaksanaan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, harus dibangun mekanisme kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. Pengelolaan risiko bencana harus dilakukan pada seluruh komunitas, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam setiap kejadian bencana, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang dianggap paling berisiko terhadap bencana. Kelompok ini disebut sebagai kelompok rentan. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok rentan terdiri atas bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia. Menurut Roland Hansen (dalam Malteser Internasional: 2012), korban bencana alam, baik saat terjadi bencana ataupun pasca bencana, biasanya didominasi oleh kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Dalam perencanaan tentang penanggulangan bencana kelompok disabilitas sering dikesampingkan, karena mereka kurang memahami tentang disabilitas secara intrinsik (Smith, 2012).

Disabilitas merupakan kata dengan konsep yang kompleks, dinamis, dan multidimensi (WHO,

2011). Penyandang disabilitas sangat erat kaitannya dengan kesehatan, baik fisik maupun mental. Penyandang disabilitas banyak dilatarbelakangi oleh masalah kesehatan, dan sebaliknya kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas adalah sulitnya berinteraksi dalam masyarakat. Mereka mengalami berbagai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Suhendra, 2017).

Penyandang disabilitas wajib diberi perlindungan dan dijamin keselamatannya dalam situasi bencana alam. Hal tersebut tertuang dalam konvensi hak penyandang disabilitas, yang menyatakan bahwa negara harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa orang dengan disabilitas yang terdampak bencana sering tidak memperoleh penanganan secara proporsional karena proses evakuasi, tanggap darurat, dan proses rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka (*Center for International Rehabilitation*, 2005). Penanganan penyandang disabilitas pada saat bencanapun dirasa masih salah kaprah. Selama ini banyak relawan bencana yang memberikan penanganan tidak tepat bagi penyandang disabilitas.

Arifin, pada tahun 2008 melakukan penelitian tentang kebijakan mitigasi bencana alam bagi difabel dengan kasus gempa di Bantul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi yang dilakukan Pemerintah Bantul secara umum berhasil memulihkan kondisi akibat gempa tahun 2006, namun hal tersebut tidak dirasakan oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ditempatkan pada kelompok terakhir yang diikutsertakan dalam proses perencanaan kebencanaan, bahkan terlupakan.

Secara garis besar, tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana berada di tangan pemerintah. Kesiapan pemerintah

dalam penanggulangan bencana telah banyak digambarkan, terutama pada level pemerintah pusat hingga kabupaten/kota serta kecamatan (Madan & Routray, 2015). Sistem otonomi daerah yang telah dijalankan sejak reformasi, menuntut pemerintah daerah yang merupakan pemangku kekuasaan, seharusnya memiliki kebijakan yang selaras dengan tujuan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerahnya. Kesiapan pemerintah lokal dalam menghadapi bencana sebenarnya juga sudah banyak dikaji dalam berbagai level (Anam, 2018).

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Kelompok penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, menyebabkan mereka membutuhkan pelayanan atau fasilitas khusus yang mendukung mobilitas mereka pada saat terjadi bencana. Penelitian ini juga akan mengungkapkan kondisi terkini, baik dalam pengetahuan maupun persepsi mereka terhadap bencana, serta mengkaji kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas dalam upaya pengelolaan risiko bencana.

Selama ini penanganan evakuasi bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana disamaratakan korban lainnya dengan kondisi fisik yang normal. Akibatnya kondisi penyandang disabilitas semakin parah ketika berada di lokasi evakuasi. Hal ini menjadi fokus permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk mengungkap fakta, keadaan tentang kontribusi pemerintah daerah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Penelitian deskriptif lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif kuantitatif menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik objek yang diteliti yaitu tentang kontribusi pemerintah dalam pengelolaan

risiko bencana dan dibatasi untuk mendeskripsikan karakteristik sebagaimana adanya. Metode kuantitatif digunakan untuk memenuhi kebutuhan objektivitas dalam upaya verifikasi terhadap sejumlah asumsi secara sistematis, spesifik, jelas, sekuensial, rinci, serta tanggapan dan pandangan dari sejumlah responden terkait dengan kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas.

Penggunaan metode kuantitatif memiliki maksud agar penelitian ini dapat memperoleh informasi komprehensif yang sangat dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Kekayaan informasi menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi upaya penyempurnaan kebijakan penanganan, perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas terutama dalam kaitannya dengan peran dan kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana.

Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut pernah mengalami bencana alam yang telah memakan banyak korban jiwa. Sebagai pelaku dan saksi sejarah tersebut, maka kesiapan dan kontribusi pemerintah dalam pengelolaan risiko bencana dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.

Sumber data yang diambil dalam penelitian meliputi para penyandang disabilitas, pemerintah daerah setempat termasuk dinas sosial, badan penanggulangan bencana daerah, tim reaksi cepat, dan lembaga sosial masyarakat lainnya yang peduli terhadap para penyandang disabilitas. Instansi pemerintah yang berkaitan erat hubungannya dengan kebencanaan dan penyandang disabilitas guna memperoleh data yang lebih akurat, sebagaimana dinas pekerjaan umum yang menangani tentang fasilitas umum dan tata ruang daerah termasuk penempatan jalur evakuasi saat terjadi bencana.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket kuesioner, berupa seperangkat pertanyaan tertulis digunakan sebagai salah satu data pendukung yang diharapkan mampu memberikan penguatan objektivitas data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Metode wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi terkait kontribusi pemerintah

daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat digali melalui angket kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan risiko bencana atau dapat juga disebut sebagai *disaster risk management*, merupakan proses terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam merencanakan, mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan setelah terjadinya bencana, dan mengambil langkah pemulihan. Pengelolaan risiko bencana merupakan ilmu terapan yang berupa pengamatan sistematis beserta analitis tentang kebencanaan bagi penguatan terhadap langkah-langkah yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan (Nick Carter, 2008).

Proses pengelolaan bencana yang direpresentasikan sebagai model siklus, peningkatan kesiapsiagaan merupakan bagian dari proses pengelolaan risiko bencana. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dalam pengelolaan risiko bencana adalah membangun kesiapsiagaan terhadap bencana. Kesiapsiagaan bencana bisa dimaknai sebagai suatu aktivitas dan perencanaan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, bertujuan untuk mengembangkan kapasitas operasional serta memfasilitasi respons yang efektif saat terjadi bencana pada suatu wilayah atau daerah.

Penyandang disabilitas merupakan sekelompok orang yang memiliki ciri khusus sebagai hasil dari interaksi antara orang dengan malfungsi organ tubuh, sikap, dan batasan lingkungan yang menghalangi mereka secara penuh dan efektif berpartisipasi dalam masyarakat setara dengan orang lain. Keadaan tersebut terjadi karena adanya masalah pada fungsi atau struktur tubuh yang secara signifikan terganggu atau bahkan hilang, misalnya fungsi tubuh, mental, fungsi sensor dan rasa sakit, ataupun penyakit-penyakit lainnya.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Fokus dan penanganan yang dilakukan bagi penyandang disabilitas tidak bisa disamaratakan dengan orang dan masyarakat pada umumnya yang memiliki keutuhan fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu persiapan

dan perencanaan yang lebih komprehensif agar penanganan penyandang disabilitas yang terdampak bencana lebih efektif. Kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan sebagai salah satu unsur keberhasilan dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas.

Kontribusi pemerintah daerah dalam penelitian ini digambarkan dengan lima informasi pokok, dan menjadi dasar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan risiko bencana. Kelima informasi pokok tersebut dapat diuraikan sebagai rencana tanggap darurat, evakuasi korban bencana, sistem peringatan dini saat terjadi bencana, mobilisasi sumber daya, dan pendidikan kesiapsiagaan bagi para penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana.

Tabel 1
Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Risiko Bencana pada Penyandang Disabilitas

No	Jenis Kontribusi	Indeks	
		f	%
1	Rencana tanggap darurat bagi penyandang disabilitas	10	33.33
2	Evakuasi bagi penyandang disabilitas	14	46.67
3	Sistem peringatan bencana bagi penyandang disabilitas	12	40.00
4	Mobilisasi sumber daya bagi penyandang disabilitas	10	33.33
5	Pendidikan kesiapsiagaan masyarakat bagi penyandang disabilitas	8	26.67
6	Lainnya, ...	4	13.33
Rata-rata		9.67	32.22

Sumber: Data Primer Penelitian 2019

Penelitian tentang pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas yang berfokus pada bagaimana kontribusi pemerintah daerah melibatkan sejumlah responden yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat. Responden yang merupakan objek dalam penelitian ini terdiri dari penyandang disabilitas, pendamping penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat peduli penyandang disabilitas, dinas sosial, dinas pekerjaan umum, Tagana, tim reaksi cepat, badan penanggulangan bencana daerah, kecamatan, kelurahan/desa, dan palang merah Indonesia.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1 (satu), diketahui bahwa terdapat lima pokok program yang dijadikan sebagai indikator kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana

bagi penyandang disabilitas. Data dari kelima inti program kegiatan tersebut diambil masing-masing dari beberapa staf yang mewakili pemerintah daerah beserta beberapa instansi dan lembaga swadaya masyarakat. Data tersebut diambil dengan melibatkan beberapa penyandang disabilitas mengenai perspektif dan pengetahuan mereka terhadap kontribusi yang telah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan daerah, di antaranya; dinas sosial, tagana, badan penanggulangan bencana daerah, dinas pekerjaan umum, beberapa instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat langsung dalam penanganan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas.

Evakuasi bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk konkrit dari kontribusi pemerintah daerah masih mendapatkan persentase tertinggi bila dilihat dari data pada tabel 1 yaitu sebesar 46.67 persen. Artinya, evakuasi korban saat terjadi bencana merupakan aktivitas dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan risiko bencana. Namun demikian, hal tersebut belum sepenuhnya didorong oleh faktor pendukung lainnya yang seharusnya juga menjadi prioritas besar keberhasilan kontribusi pemerintah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas.

Faktor lain yang berperan dalam keberhasilan evakuasi korban bencana adalah rencana tanggap darurat dan mobilisasi sumber daya bagi penyandang disabilitas. Kedua program ini merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas hanya mampu memperoleh indeks angka sebesar 33.33 persen, atau hanya 10 dari 30 responden staf perwakilan dari beberapa instansi pemerintah daerah.

Evakuasi korban bencana akan lebih efektif dan maksimal apabila didukung oleh tanggap darurat yang bereaksi cepat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan rencana yang lebih terkoordinasi dalam menangani korban bencana, terutama bagi para penyandang disabilitas. Pengalaman secara umum menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung ditinggalkan pada saat evakuasi bencana, karena kurangnya persiapan dan perencanaan dalam pengelolaan risiko bencana, serta kurangnya fasilitas dan layanan umum yang tersedia.

Mobilisasi sumber daya merupakan potensi dan peran masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana alam. Sama halnya dengan rencana tanggap darurat, potensi tersebut juga menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan evakuasi korban bencana. Mobilisasi sumber daya merupakan salah satu persiapan yang seharusnya telah diantisipasi ketika terjadi bencana, sehingga dapat membantu percepatan sekaligus penyelamatan dalam upaya evakuasi korban bencana, terutama bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih terfokus.

Bentuk kontribusi pemerintah daerah selanjutnya adalah program pemasangan dan instalasi sistem peringatan bencana bagi penyandang disabilitas. Data yang dipaparkan pada tabel 1, menunjukkan bahwa sistem peringatan dini memperoleh indeks angka sebesar 40 persen. Indeks angka tersebut lebih besar daripada indeks yang diperoleh pada kedua program kontribusi pemerintah sebelumnya, yaitu rencana tanggap darurat dan mobilisasi sumber daya. Namun demikian, data yang diperoleh tidaklah sepenuhnya murni dalam bentuk sistem peringatan bencana yang dibuat dan dipersiapkan khusus sesuai dengan jenis disabilitas, melainkan masih dalam bentuk sistem peringatan bencana yang digunakan untuk masyarakat pada umumnya.

Belum adanya sistem peringatan bencana yang didesain secara khusus dan peruntukkan sesuai dengan jenis disabilitas, menyebabkan para penyandang disabilitas bergantung kepada anggota keluarga, maupun lingkungan sekitar untuk mendapatkan informasi peringatan bencana. Kondisi ini disebabkan kurangnya pengetahuan, baik dari pemerintah daerah untuk memberikan bentuk peringatan sebagaimana yang seharusnya dan sesuai dengan jenis disabilitas. Hal ini juga disebabkan kurangnya komunikasi dari penyandang disabilitas untuk memberikan saran dan masukan sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah daerah beserta instansi dan lembaga masyarakat terkait mengenai sistem peringatan bencana yang sesuai dengan bentuk dan desain yang mereka butuhkan.

Program inti kelima dari kontribusi pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian pendidikan tentang kesiapsiagaan bagi penyandang disabilitas

dalam pengelolaan risiko bencana. Program ini mendapatkan perhatian yang paling kecil di antara kelima kontribusi pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan indeks angka sebesar 26,67 persen dari pemerintah daerah, instansi, dan lembaga masyarakat terkait.

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam suatu program merupakan awal dari suksesnya program tersebut, karena dari kegiatan pendidikan inilah pengetahuan ditransfer dan diberikan. Pengetahuan dan pemahaman yang diberikan melalui proses dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan diharapkan menjadi sebuah kesadaran bagi pesertanya (penyandang disabilitas). Secara umum, penyandang disabilitas lebih banyak diposisikan sebagai objek dalam program penyelenggaraan pendidikan tersebut. Seperti halnya dalam program pendidikan simulasi evakuasi, mereka hanya diposisikan sebagai korban yang ditolong dan pasif, bukan sebagai subjek yang semestinya mampu dan aktif mengantisipasi risiko bencana sebelum adanya pertolongan dari pihak lain.

Kegiatan pendidikan kesiapsiagaan bagi penyandang disabilitas sebenarnya telah banyak dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan instansi swasta lainnya yang peduli terhadap masyarakat penyandang disabilitas secara mandiri, akan tetapi belum banyak disadari keberadaannya oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan guna tercapainya tujuan yang dapat membantu mengurangi risiko bencana bagi penyandang disabilitas melalui proses pendidikan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas hanya memperoleh indeks angka rata-rata sebesar 32,22 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh responden penelitian hanya 10 orang saja apabila dikonversikan ke dalam jumlah responden yang menyadari dan memahami betapa pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana. Hal ini menjadi salah satu informasi yang menarik, sebagai kajian tentang bagaimana seharusnya pemerintah memberikan perhatian dan bantuan yang selayaknya dilakukan guna mengurangi dampak risiko bencana, terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Kontribusi pemerintah daerah tersebut tidak saja diberikan kepada staf dinas pemerintah daerah, instansi dan lembaga swadaya masyarakat terkait, melainkan juga diberikan kepada para penyandang disabilitas untuk mengungkapkan sejauhmana mereka mengetahui tentang kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Pada tabel 1 ditunjukkan bahwa hanya 6 dari 30 responden penyandang disabilitas yang mengetahui adanya campur tangan dan kontribusi pemerintah pada setiap aspek informasi pokok kontribusi pemerintah.

Banyak penyandang disabilitas yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak mengetahui informasi tersebut, kecuali hanya bergantung kepada keluarga dan lingkungan sekitar yang masih peduli terhadap kondisi mereka. Situasi dan kondisi ini menjadi suatu hal yang ironi. Sebagai bukti bahwa belum maksimalnya atau bahkan tidak adanya sinkronisasi antara apa yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah beserta instansi dan lembaga swadaya lainnya, dengan apa yang diinginkan oleh para penyandang disabilitas dalam pengelolaan risiko bencana.

Namun demikian, informasi mengenai kurangnya kesadaran sosial masyarakat dalam berbagai aspek terutama terhadap para penyandang disabilitas, juga dapat menjadi kendala dan penghambat tercapainya tujuan dari pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas secara maksimal. Masih rendahnya kesadaran dari orang tua ataupun keluarga dalam memandirikan penyandang disabilitas yang masih tinggal bersama sebagai bagian dari anggota keluarga. Bahkan tidak sedikit orang tua yang justru menyembunyikan keberadaan mereka sebagai penyandang disabilitas. Belum adanya fasilitas yang didesain secara khusus bagi penyandang disabilitas, membuat mereka merasa kesulitan dalam mengakses layanan dasar. Hal tersebut merupakan salah satu dari beberapa faktor kendala dan penghambat dalam hal keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengelolaan risiko bencana.

Kontribusi aktif dari pemerintah daerah dan beberapa instansi serta lembaga swadaya masyarakat untuk ikut memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat diperlukan. Penyandang disabilitas sebenarnya

sangat terbuka untuk dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan. Penyandang disabilitas di sebagian daerah sudah memiliki wadah atau organisasi yang menampung aspirasi mereka. Organisasi tersebut dapat digunakan sebagai wadah dan sarana pemberdayaan mereka dalam berbagai aspek, termasuk dapat dilibatkan dalam memberikan aspirasi terkait kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana. Dengan demikian, pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas akan terwujud dengan baik, optimal, dan tepat sasaran.

Kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana sampai dengan penelitian ini dilakukan, secara umum masih sebatas pemberian bantuan pada saat tanggap darurat dan rekonstruksi bangunan fisik pasca bencana. Pemerintah setempat belum mampu menjangkau upaya-upaya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas, misalnya: memberi pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Pengetahuan SKPD terkait, dalam hal kesiapan pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas juga masih minim. Mereka belum memiliki pemahaman bagaimana pengelolaan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Optimalisasi pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas juga dapat dilakukan dengan adanya relawan kemanusiaan yang aktif, cepat tanggap, dan fokus terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Meskipun jumlah relawan kemanusiaan dan kebencanaan yang memahami dan mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas masih sangat terbatas, bukan berarti mereka tidak ada pada setiap daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko bencana merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus oleh berbagai pihak dan lapisan masyarakat, baik dari instansi pemerintahan, para pelaku usaha, maupun masyarakat dalam merencanakan, meredam, mengurangi dampak, dan kerugian sebagai akibat terjadinya bencana. Kegiatan tersebut diteruskan

dengan mengambil suatu tindakan setelah terjadi bencana serta melakukan langkah pemulihan.

Setiap terjadi bencana maka akan terdapat korban yang terdampak, terutama bagi kelompok masyarakat rentan termasuk di dalamnya adalah masyarakat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan melalui pengelolaan risiko bencana bagi disabilitas. Kontribusi pemerintah daerah turut mengambil peran dalam memaksimalkan usaha tersebut melalui terobosan yang akan membantu mengurangi dampak risiko bencana bagi penyandang disabilitas.

Secara garis besar kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas dan perlu untuk ditingkatkan. Sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan, belum ada koordinasi yang maksimal antar berbagai instansi dan lembaga pemerintah daerah dalam penanganan masalah risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan para penyandang disabilitas menjadi kendala dalam kontribusi tersebut.

Pemerintah daerah setempat hingga pada saat penelitian ini dilakukan belum mampu menjangkau upaya-upaya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas. Secara umum, kontribusi pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan risiko bencana masih sebatas pemberian bantuan pada saat tanggap darurat dan rekonstruksi bangunan fisik pasca bencana. Sedangkan pada aspek fasilitas umum yang menjadi sasaran rekonstruksi bangunan fisik, justru belum memperhatikan pada aspek tempat tinggal (rumah) bagi penyandang disabilitas.

Hal lain yang ditemukan dalam pengelolaan risiko bencana adalah, adanya kontribusi dari relawan baik personal maupun lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, fungsi dan tugas dari relawan tersebut masih bersifat umum dan tidak fokus pada masyarakat penyandang disabilitas. Keberadaan dari relawan inipun belum sepenuhnya terkoordinasi secara baik, sehingga perlu ada upaya lanjutan agar fungsi dan tugas mereka lebih optimal, dan diharapkan tidak hanya muncul ketika bencana terjadi, tetapi turut aktif dalam pengelolaan risiko bencana dari perencanaan hingga penanganan

risiko bencana itu sendiri. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mengurangi pada kasus dan kekurangan tersebut adalah dengan memaksimalkan bantuan yang ditujukan untuk korban bencana alam dan mempererat koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.

Atas dasar kesimpulan di atas, maka sebagai upaya pengurangan dampak risiko bencana bagi penyandang disabilitas, maka kontribusi pemerintah daerah dan beberapa instansi direkomendasikan untuk: (1) melakukan koordinasi dan sinergitas lintas sektor, terutama memprioritaskan kelompok disabilitas dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah, yang dikuatkan dengan peraturan daerah setempat mulai dari tingkat desa sampai provinsi. (2) Optimalisasi fungsi relawan kemanusiaan/kebencanaan yang fokus pada para penyandang disabilitas, terutama mengajak mereka dalam setiap kegiatan, komunikasi dan simulasi pengurangan risiko bencana. (3) Instansi ataupun lembaga swadaya terkait pengelolaan risiko bencana harus memperhatikan fasilitas umum yang ramah bagi masyarakat disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala B2P3KS Yogyakarta yang telah menugaskan peneliti untuk melakukan penelitian tentang penanganan risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh yang telah memberikan ijin dan informasi yang diperlukan dalam penyempurnaan penulisan karya tulis ilmiah ini dan para staf dinas sosial yang telah membantu dalam pendampingan selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., Mutholib, A., Setiyawan, F., Andini, B.E., Sefniwati. (2018). *Kesiapan Institusi Lokal dalam Menghadapi Bencana Tsunami: Studi Kasus Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Purus, Kota Padang*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.6.1.15-29>
- Arifin, S. (2008). *Model Kebijakan Mitigasi Bencana Alam bagi Difabel (Studi Kasus di Kabupaten*

- Bantul, Yogyakarta*). *Jurnal Fenomena* Vol. 6 Nomor 1 Maret 2008, 1-17.
- Carter, N. (2008). *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*. Mania: ADB.
- Center for International Rehabilitation. (2005). *International Disability Rights Monitor: Disability and Early Tsunami Relief Efforts in India, Indonesia and Thailand*. Washington DC: Center for International Rehabilitation.
- Kamil, S. (2016). *Disability - Inclusive Disaster Risk Management*. Hertogenbosch: Liliane Fonds.
- Madan, A., & Routray, J. K. (2015). *Institutional framework for preparedness and response of disaster management institutions from national to local level in India with focus on Delhi*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 14, 545–555. doi:10.1016/j.ijdr.2015.10.004.
- Malteser International. (2012, October 23). Dipetik November 12, 2012, dari Relief Organisations launch Disability Inclusive DRR Network: www.malteser-international.org/en/home/press/article/article/7552/16914.html
- Oos, Anwar M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Paidi. (2012). *Pengelolaan Manajemen Risiko Bencana Alam di Indonesia*. Jakarta: STIE Dharma Bumiputera.
- Smith, F., Jolley, E., Schmidt, E. (2012). *Disability and Disasters: The Importance of an Inclusive Approach to Vulnerability and Social Capital*. Sightsavers.
- Spurway, K. Griffith, T. (2016). *Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction: Vulnerability and Resilience Discourses, Policies and Practices*. *Internasional Perspectives on Social Policy, Administration, and Practice*. DOI 10.1007/978-3-319-42488-0_30
- Suhendra, A. (2017). *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas*. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. DOI: 10.21787/mp.1.3.2017.131-142
- World Health Organization. (2011). *World Report on Disability*. Geneva: World Health Organization. Diambil dari: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf

